

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL  
TINGKAT II ANGGKATAN XXIV - 2025**

**VISITASI  
KEPEMIMPINAN  
NASIONAL KE  
KABUPATEN  
ACEH UTARA**



**KELOMPOK 1**

# DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

**COACH**

**: Dr. Ina Yuniati, Dipl.M, M.Sc**

**KETUA**

**: Ronni Fajar Purba, SH, MH**

**SEKRETARIS**

**: Budiiman Hadiwasito, A.Md,Im, S.Sos, M.Si**

**PRESENTER**

**: Rakha Sukma Purnama, A.Md.Im, S.H.,M.Si**

**ANGGOTA**

- : • Teuku Cut Ibrahim, SE.,M.Si**
- Drs. Zulkifli, M.S.M**
- Jeffridin Siregar, AP, MM**
- Mario Otomosi Zebua, SH.,M.Si**
- M. Iqbal Nasution, S.STP,M.Si**
- Reza Kamiliin, S.STP**
- Taufik, ST, M.Si**
- Muhammad Junaidi, SH, MH**
- dr. Abdul Fatah, MPPM**
- Khairuzzadi, S.STP**
- Amar Buchdiansyah, SH, MH**
- Azwar Anas, SH, MM**
- Erybowo Radyan Asmono, SH, MH**
- Gindo Ginting, SH, MH**
- Hubertus Hence, SE, MH**
- Jerry Risnandar Saktinegara, SS, MM**
- Muhammad Lukman, A.Md.IP, SH, M.Si**
- Pahrudin Saputra, S.Ag, M.Si**

# DAFTAR ISI

**01 COVER**

**02 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK**

**03 DAFTAR ISI**

**04 PENDAHULUAN**

**05 METODOLOGI**

**06 OBJEK STUDI**

**07 HASIL TEMUAN LAPANGAN**

**09 ANALISIS DAN SINTESIS**

**10 IMPLIKASI KEBIJAKAN**

**11 REKOMENDASI KEBIJAKAN**

**11 KESIMPULAN**

**12 LAMPIRAN**

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun energi. Namun demikian, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dioptimalkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Aceh Utara masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Pembangunan desa bukan hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi desa. Dengan demikian, pembangunan dapat dirasakan secara merata, memperkuat kemandirian desa, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.



## TUJUAN STUDI LAPANGAN

- Mengenai kondisi riil pembangunan desa, khususnya dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan
- Menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat
- Menilai efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis desa
- Merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian desa

## MANFAAT STUDI

- Memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pembangunan desa dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan
- Mengidentifikasi potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal
- Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, kontekstual, dan dapat diaplikasikan baik di Kabupaten Aceh Utara maupun di daerah lain
- Meningkatkan kepekaan sosial terhadap isu kesenjangan ekonomi dan kemiskinan
- Mendorong lahirnya inovasi dan model pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, serta berkelanjutan
- Memperkuat kemampuan analisis peserta dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan
- Menjadi sarana pembelajaran langsung bagi peserta untuk memahami strategi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan berbasis desa





# **METODOLOGI**

## **LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara  
pada 19 Agustus 2025

## **PENDEKATAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

- Wawancara mendalam dengan Sekda dan OPD terkait
- Diskusi dengan masyarakat dan perangkat desa
- Studi literatur data BPS dan dokumen RPJMD

## **INFORMAN DAN PARTISIPAN**

1. Sekretaris Daerah
2. Perangkat desa
3. Tokoh masyarakat
4. Akademisi lokal

## **KETERBATASAN STUDI**

- Keterbatasan waktu kunjungan lapangan
- Data sekunder terbatas pada publikasi resmi pemerintah

# GAMBARAN UMUM LOKASI/ OBJEK STUDI

## KONDISI SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

- Angka kemiskinan tertinggi di Aceh (16%)
- Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perikanan
- Desa mandiri masih sangat sedikit dibanding desa tertinggal
- Rentan terhadap bencana-bencana alam seperti banjir dan abrasi

## PROFIL KELEMBAGAAN/ STAKEHOLDER

- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
- Perusahaan besar (PT PIM, PT Arun LNG)
- Masyarakat desa (852 desa)
- BUMDes dan UMKM lokal

## ISU ATAU PERMASALAHAN UTAMA

- Tingginya angka kemiskinan struktural
- Penggunaan Dana Desa kurang efektif
- Rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal di industri
- CSR perusahaan tidak terintegrasi dengan pembangunan daerah
- Belum optimalnya pemberdayaan diberbagai sektor yang memiliki potensi
- Keterbatasan penggunaan anggaran karena kesesuaian kewenangan



# HASIL TEMUAN LAPANGAN

## DATA DAN FAKTA KUNCI

### 1. Tingkat Kemiskinan & Data Sosial

- Tahun 2024, penduduk miskin Aceh Utara sebanyak 104.490 jiwa (16,11%)

### 2. Infrastruktur & Pembangunan Fisik

- Pemda fokus pemeliharaan jalan & irigasi (program 100 hari kerja Bupati)
- Pembangunan jalan melibatkan DPRK & dinas terkait untuk mutu standar
- Dana desa dipakai swakelola infrastruktur, serap tenaga kerja lokal

### 3. Potensi Produk Unggulan & Sektor Pertanian

- Aceh Utara mengembangkan beberapa komoditas unggulan di sektor perkebunan, antara lain sawit, kelapa, kakao, pinang, dan karet
- Untuk komoditas pinang khususnya, ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan lahan tanam. Luas lahan sudah mencapai ribuan hektar, produksi ribuan ton per tahun

### 4. Isu dan Tantangan Lingkungan & Akses

- Banjir menjadi masalah serius
- Infrastruktur jalan yang rusak juga menghambat akses warga dan distribusi hasil pertanian

### 5. Kebijakan Desa dan Pemberdayaan

- Pemerintah Aceh Utara menekankan bahwa penggunaan dana desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat
- Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di desa-desa juga didorong sebagai pilar pemberdayaan ekonomi lokal.

### 6. Keterbatasan Anggaran & Kewenangan

- Batas kewenangan hambat kebutuhan mendesak

# HASIL TEMUAN LAPANGAN

## ANALISIS PERMASALAHAN

Dari informasi di atas, beberapa hal yang sangat relevan:

- Penurunan kemiskinan menunjukkan ada kemajuan, namun kemiskinan tetap menjadi perhatian. Artinya, program tidak hanya menurunkan jumlah orang miskin, tapi mengurangi beban yang dialami oleh mereka yang masih miskin
- Inisiatif untuk swakelola dan penyertaan tenaga kerja lokal adalah langkah agar manfaat ekonomi lebih langsung dirasakan masyarakat
- Potensi sektor perkebunan bisa menjadi modal produk unggulan — sawit, pinang, kakao, karet — tapi harus dikembangkan lebih baik (misal: pengolahan, nilai tambah, pemasaran)
- Tantangan infrastruktur dan akses masih nyata — jalan rusak, akses desa terisolir karena banjir, irigasi yang butuh perbaikan - semua ini menghambat produktivitas dan pemasaran produk unggulan
- Ada kebijakan yang mendukung pemberdayaan desa dan masyarakat desa, tapi dalam praktiknya belum dilaksanakan secara maksimal

# HASIL TEMUAN LAPANGAN

## PANDANGAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT / STAKEHOLDER

- Harapan masyarakat agar Dana Desa diarahkan untuk pengembangan usaha produktif
- Pemda ingin CSR industri masuk ke program pengentasan kemiskinan
- Masyarakat menghendaki penguatan SDM lokal agar bisa masuk ke sektor industri
- Penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah

# HASIL TEMUAN LAPANGAN

## PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICES)

- Pendekatan Inklusif, Partisipatif, dan Transparan:

Pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam seluruh proses penanggulangan kemiskinan

- Penguatan Sektor Pertanian:

Peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan petani menjadi fokus untuk menciptakan pendapatan yang lebih stabil

- Bantuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM):

Bantuan diberikan untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder yang masih rendah di Aceh

- Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran:

Program seperti PKH (Bantuan Tunai), BLT, KIP, dan KIS dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjangkau kelompok rentan

- Pemberdayaan Masyarakat:

Melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk menumbuhkan kemandirian dan kesadaran warga

- Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik:

Investasi pada infrastruktur dasar berdampak positif pada aksesibilitas ke pelayanan kesehatan dan pendidikan

- Kerja Sama Multisektor:

Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat krusial dalam mendukung agenda pengurangan kemiskinan

# ANALISIS DAN SINTESIS

## AKAR MASALAH

1. Kemiskinan Struktural yang Tinggi
  - Jumlah penduduk miskin masih besar (16% atau ±104 ribu jiwa)
  - Kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat, sehingga beban masyarakat miskin semakin berat
2. Pemanfaatan Potensi Daerah Belum Optimal
  - Pertanian, perikanan, dan perkebunan masih dikelola secara tradisional.
  - Hilirisasi, pengolahan, dan pemasaran produk unggulan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa) belum berkembang maksimal
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas
  - Jalan rusak dan akses transportasi terbatas
  - Desa sering terisolir karena banjir dan abrasi
  - Irigasi belum memadai untuk mendukung produktivitas pertanian.
  - Keterbatasan kewenangan dalam penggunaan anggaran
4. Pengelolaan Dana Desa Kurang Efektif
  - Lebih banyak diarahkan untuk pembangunan fisik.
  - Aspek pemberdayaan masyarakat dan usaha produktif belum berjalan optimal
5. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM Lokal
  - Masyarakat desa masih bergantung pada sektor tradisional yang berisiko tinggi
  - SDM lokal kurang terampil sehingga belum mampu memanfaatkan peluang kerja di sektor industri maupun usaha produktif desa

## DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

1. Dampak Sosial
  - Kesenjangan sosial meningkat karena tingginya kemiskinan struktural meskipun ada potensi sumber daya alam
  - Kualitas hidup rendah, ditandai dengan beban kemiskinan yang semakin berat (kedalaman dan keparahan meningkat)
  - Keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan, membuat SDM lokal sulit bersaing dan banyak bergantung pada sektor tradisional
  - Ketergantungan masyarakat desa pada sektor pertanian dan perikanan tradisional, sehingga rawan ketika terjadi gagal panen, banjir, atau abrasi
2. Dampak Ekonomi
  - Produktivitas desa rendah karena akses terbatas, infrastruktur rusak, dan irigasi tidak memadai
  - Hilirisasi dan nilai tambah minim pada komoditas unggulan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa), sehingga ekonomi lokal kurang berkembang
  - Pengelolaan Dana Desa belum efektif, lebih banyak untuk fisik daripada pemberdayaan, sehingga potensi usaha produktif masyarakat belum tumbuh optimal
  - Pendapatan masyarakat stagnan, akibat keterbatasan peluang kerja di industri dan lemahnya daya saing SDM lokal
3. Dampak Lingkungan
  - Bencana banjir dan abrasi menyebabkan desa-desa terisolir, rumah terendam, dan sawah gagal panen
  - Kerusakan infrastruktur jalan akibat kondisi lingkungan memperburuk akses distribusi hasil pertanian
  - Degradasi lahan pertanian akibat kurangnya sistem irigasi yang baik, mengurangi produktivitas dan ketahanan pangan lokal

# ANALISIS DAN SINTESIS

## KESENJANGAN ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITAS LAPANGAN

### 1. Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan : Menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan desa

Realitas : Angka kemiskinan turun sedikit, tetapi kedalaman dan keparahan meningkat, beban masyarakat miskin makin berat

### 2. Dana Desa

Kebijakan : Dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan usaha produktif serta perbaikan infrastruktur

Realitas : Pemberdayaan belum optimal karena terbentur aturan

### 3. Infrastruktur Desa

Kebijakan : Perbaikan jalan, irigasi, dan swakelola agar serap tenaga kerja lokal

Realitas : Jalan masih rusak, desa sering terisolir banjir, irigasi kurang berfungsi

### 4. Pengembangan Komoditas Unggulan

Kebijakan : Sawit, pinang, kakao, karet, kelapa dijadikan motor ekonomi desa.

Realitas : Dikelola tradisional, hilirisasi minim, nilai tambah rendah

### 5. Pemberdayaan SDM

Kebijakan : Meningkatkan kualitas SDM lokal agar

Realitas : terserap industri  
SDM masih rendah keterampilan, tetap bergantung pada sektor tradisional berisiko tinggi

# IMPLIKASI KEBIJAKAN

## RELEVANSI DENGAN KEBIJAKAN YANG ADA

- Kebijakan Dana Desa sesuai UU Desa (OVOP) one village one product
- RPJMD Aceh Utara fokus pada pengentasan kemiskinan

## AREA YANG MEMBUTUHKAN PERUBAHAN

- Fleksibilitas penggunaan Dana Desa
- Integrasi CSR perusahaan dengan program Pemda.
- Penguatan pendidikan vokasi untuk masyarakat desa

## PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

### Peluang

Potensi sumber daya alam besar: pertanian, perikanan, perkebunan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa)

Kebijakan pembangunan berbasis desa dengan dukungan dana desa dan program pemberdayaan

Inisiatif swakelola proyek desa menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat ekonomi desa

Dukungan CSR perusahaan besar (PT PIM, PT Arun LNG) serta peluang kerja sama multisektor

Pembentukan BUMDes/BUMG dan dorongan UMKM serta ekonomi kreatif desa

Program bantuan sosial tepat sasaran (PKH, BLT, KIP, KIS) untuk kelompok rentan

### Tantangan

Tingginya kemiskinan struktural (16% atau ±104 ribu jiwa), dengan kedalaman dan keparahan meningkat

Pemanfaatan potensi daerah masih tradisional, hilirisasi dan pemasaran produk unggulan belum optimal

Infrastruktur rusak, desa terisolir akibat banjir/abrasi, irigasi belum memadai untuk mendukung pertanian

CSR belum terintegrasi dengan program pembangunan daerah, kontribusi belum maksimal

Rendahnya keterampilan dan daya saing SDM lokal sehingga sulit terserap industri dan usaha produktif

Ketergantungan masyarakat pada bantuan, serta risiko gagal panen/abrasi yang melemahkan ketahanan ekonomi

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## OPSI KEBIJAKAN

### 1. Pengembangan Sektor Unggulan Cepat Tumbuh

- Perikanan & Budidaya: Aceh Utara punya lahan tambak luas, potensi produksi tinggi, dan keterlibatan tenaga kerja lokal yang besar. Fokus kebijakan adalah pada penyediaan benih unggul, pakan, pengendalian penyakit, dan perbaikan pelabuhan perikanan
- Pertanian & Perkebunan: sawah, pinang, kakao, karet, dan kelapa merupakan basis ekonomi masyarakat. Arah kebijakan perlu menitikberatkan pada hilirisasi, misalnya penggilingan padi modern (RMU), olahan pinang menjadi produk ekspor, atau kakao menjadi bahan setengah jadi
- Wisata Alam & Religi: pantai, pegunungan, dayah dan masjid tua bisa digerakkan dengan melibatkan masyarakat lokal

### 2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

- Penguatan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dan koperasi. Opsi kebijakannya adalah memperkuat kelembagaan ini sebagai “offtaker” produk lokal

### 3. Digitalisasi Ekonomi Lokal

- Banyak produk pertanian, perikanan, dan wisata lokal Aceh Utara belum terkoneksi dengan pasar nasional maupun digital. Kebijakan bisa diarahkan untuk mempercepat literasi digital, membangun platform pemasaran online, dan mendukung jaringan internet di desa

### 4. Diversifikasi Sumber Ekonomi

- Selain sektor basis, Aceh Utara punya sumber daya alam lain seperti kehutanan dan migas. Namun, opsi kebijakan di sini harus hati-hati: kehutanan dikembangkan berbasis konservasi (mangrove, hasil hutan bukan kayu), sedangkan migas ditata dengan regulasi yang menjamin manfaat fiskal sampai ke masyarakat

### 5. Mitigasi Risiko Sosial & Lingkungan

- Banyak desa rawan banjir dan akses jalan rusak. Opsi kebijakan juga harus menysasar pembangunan infrastruktur adaptif: perbaikan jalan produksi, irigasi pertanian, tanggul banjir, serta tata ruang berbasis mitigasi risiko

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## PRIORITAS REKOMENDASI

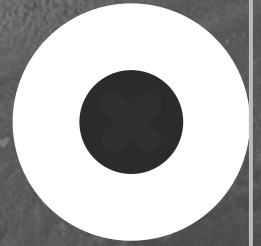
1. Peningkatan Infrastruktur yang Adaptif
  - Fokus pembangunan jalan, irigasi, dan tanggul banjir untuk akses ke pasar, meningkatkan hasil pertanian, serta melindungi masyarakat miskin dari ancaman bencana
2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa (BUMG/Koperasi)
  - Mendorong BUMG dan koperasi menjadi penggerak ekonomi lokal, pembeli hasil produksi, pengelola modal us, dan penghubung produk desa dengan pasar
3. Pengembangan Sektor Unggulan Cepat Tumbuh
  - Perikanan & Budidaya: optimalkan tambak dan pelabuhan perikanan
  - Pertanian & Perkebunan: kembangkan industri seperti RMU modern, produk pinang ekspor, dan kakao fermentasi
  - Wisata Alam & Religi: dorong wisata berbasis masyarakat melalui homestay dan UMKM kuliner
4. Digitalisasi Ekonomi Lokal
  - Tingkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, sediakan platform pemasaran online, dan perluas jaringan internet desa untuk memperluas pasar produk unggulan
5. Diversifikasi Ekonomi Berbasis SDA
  - Kelola hutan secara berkelanjutan (termasuk pelestarian mangrove dan pemanfaatan hasil hutan nonkayu) serta pastikan pengelolaan migas berjalan dengan regulasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Pemetaan Mikro Berbasis Data
  - Integrasi data kemiskinan (DTKS, SDGs Desa) dengan potensi ekonomi desa
  - Peta potensi sektoral tiap gampong bisa menjadi dasar perencanaan yang lebih presisi
2. Sinergi Lintas OPD & Program Terpadu
  - Dinas Pertanian, DKP, Dispar, Diskop, dan Kominfo harus bekerja dalam satu kerangka program
  - Program pemberdayaan masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan
3. Kemitraan Pentahelix
  - Pemerintah menggandeng perguruan tinggi untuk riset & inovasi, pesantren/dayah sebagai pusat pelatihan keterampilan, swasta untuk investasi & CSR, diaspora untuk akses pasar
  - Media lokal dan komunitas digital bisa menjadi cara promosi produk unggulan
4. Penguatan Kapasitas SDM Lokal
  - Program vokasi untuk pemuda desa di bidang pertanian modern, budidaya perikanan, pariwisata, dan digital marketing
  - Pendampingan UMKM agar bisa naik kelas dengan manajemen usaha, akses modal, dan sertifikasi produk
5. Skema Pembiayaan Campuran
  - Kombinasi dana desa, dana CSR perusahaan, serta pembiayaan mikro
  - Terdapat mekanisme penjaminan risiko agar usaha kecil tidak jatuh bangkrut karena gagal panen atau fluktuasi harga
6. Monitoring & Evaluasi Berbasis Teknologi
  - Membangun dashboard kemiskinan dan ekonomi desa yang bisa diakses lintas OPD
  - Evaluasi berbasis data real-time akan membantu adaptasi kebijakan dan menghindari program yang tidak efektif
7. Sinkronisasi Anggaran & Kewenangan
  - Lakukan harmonisasi regulasi pusat-daerah melalui dialog & penyempurnaan aturan agar tidak tumpang tindih
  - Perkuat kapasitas pemda dalam perencanaan anggaran, optimalisasi PAD/BUMD, dan SDM pengelola keuangan
  - Dorong transparansi & akuntabilitas lewat akses informasi publik, audit, dan partisipasi masyarakat
  - Kembangkan strategi pendanaan kreatif untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat

# KESIMPULAN



Kemiskinan di Aceh Utara tidak hanya ditandai oleh tingginya jumlah penduduk miskin, tetapi juga oleh meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa beban hidup masyarakat miskin semakin berat, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang lebih terintegrasi, berbasis potensi lokal, dan melibatkan multipihak.

Analisis potensi sektoral memperlihatkan bahwa perikanan, pertanian-perkebunan, dan wisata alam-religi merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan dengan dampak langsung ke rumah tangga miskin. Sementara itu, koperasi dan digitalisasi menjadi katalisator penting yang mampu memperkuat rantai nilai dan membuka akses pasar yang lebih luas. Sektor lain seperti kehutanan dan tambang/migas tetap relevan, namun harus dikelola hati-hati dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat.

Selain itu, keterbatasan penggunaan anggaran akibat ketidaksesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan serius. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih program, kesenjangan pembiayaan, dan keterlambatan realisasi kebijakan di tingkat lokal. Karena itu, harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas level pemerintahan sangat diperlukan agar sumber daya fiskal dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi implementasi yang menyeluruh, yaitu: pemetaan mikro berbasis data, sinergi lintas OPD, kemitraan pentahelix, penguatan kapasitas SDM lokal, skema pembiayaan campuran, serta monitoring berbasis teknologi. Dengan demikian, setiap program tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

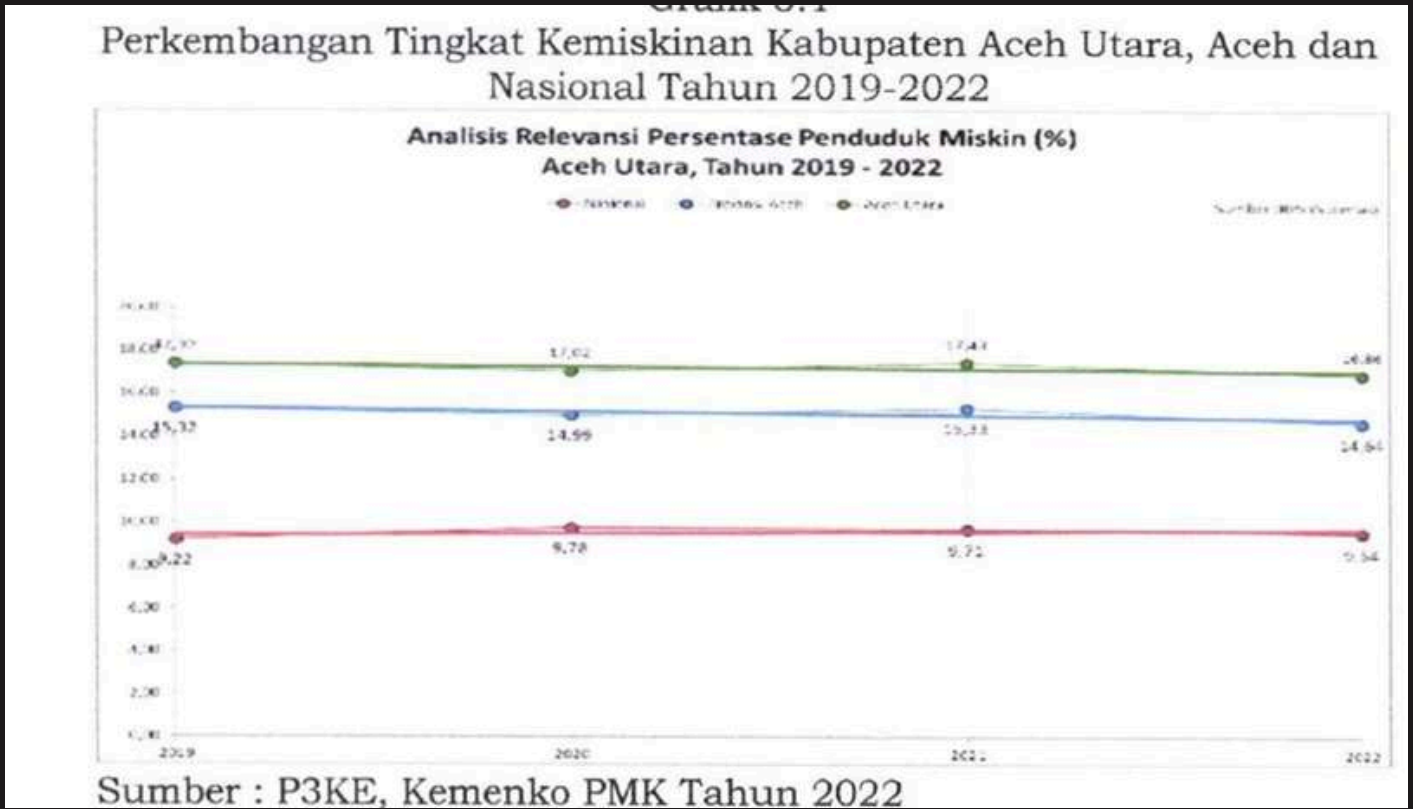
Dengan mengutamakan sektor yang cepat tumbuh, memperkuat kelembagaan lokal, dan mendorong inovasi berbasis digital, Aceh Utara berpeluang mempercepat transformasi ekonominya. Keberhasilan pengentasan kemiskinan di daerah ini akan sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang akuntabel, serta kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga agama, dan masyarakat sipil.

Singkatnya, kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Aceh Utara adalah kombinasi antara kebijakan afirmasi, pemanfaatan potensi unggulan lokal, penyelarasan kewenangan fiskal, serta penguatan ekosistem kolaboratif multipihak yang berorientasi pada keberlanjutan.

# LAMPIRAN



## GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN ACEH UTARA, ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2019-2022



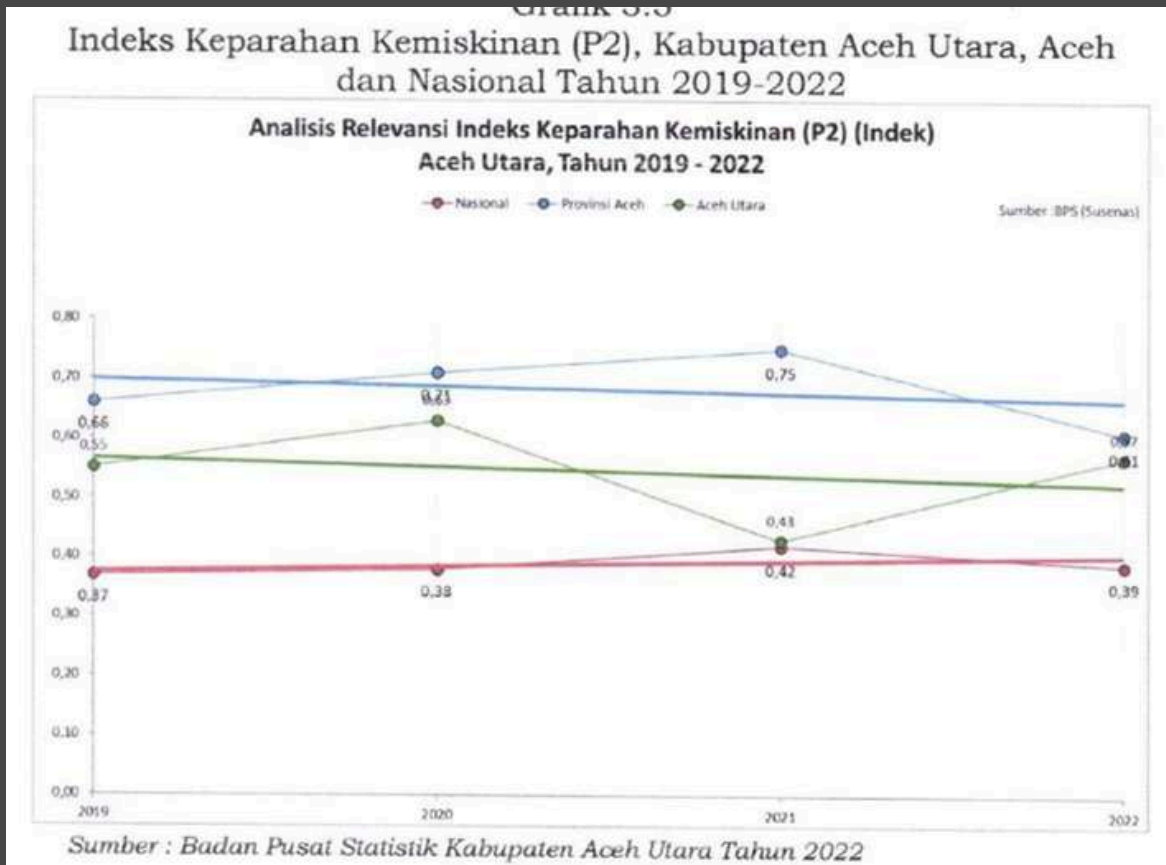
## GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2019-2022



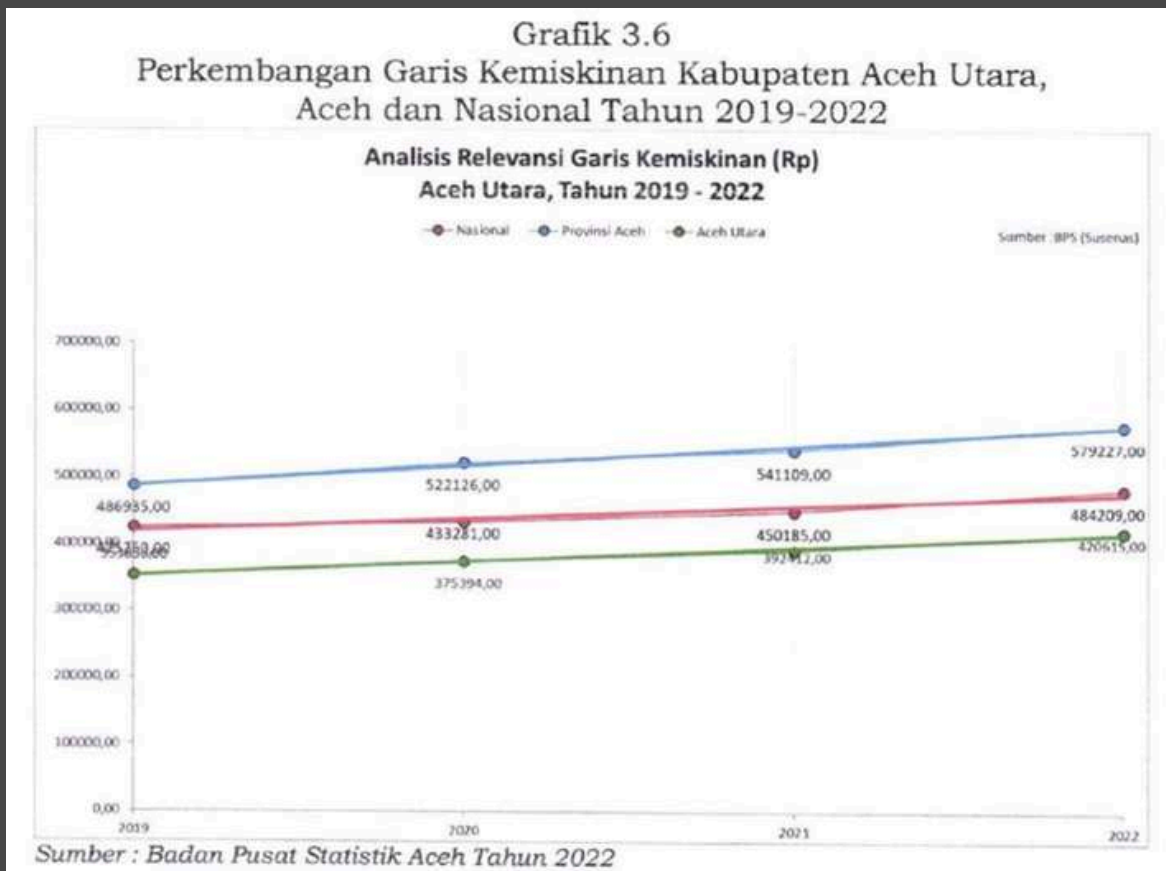
# LAMPIRAN



## GRAFIK INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P2), KABUPATEN ACEH UTARA, ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2019-2022



## GRAFIK PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN KABUPATEN ACEH UTARA, ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2019-2022



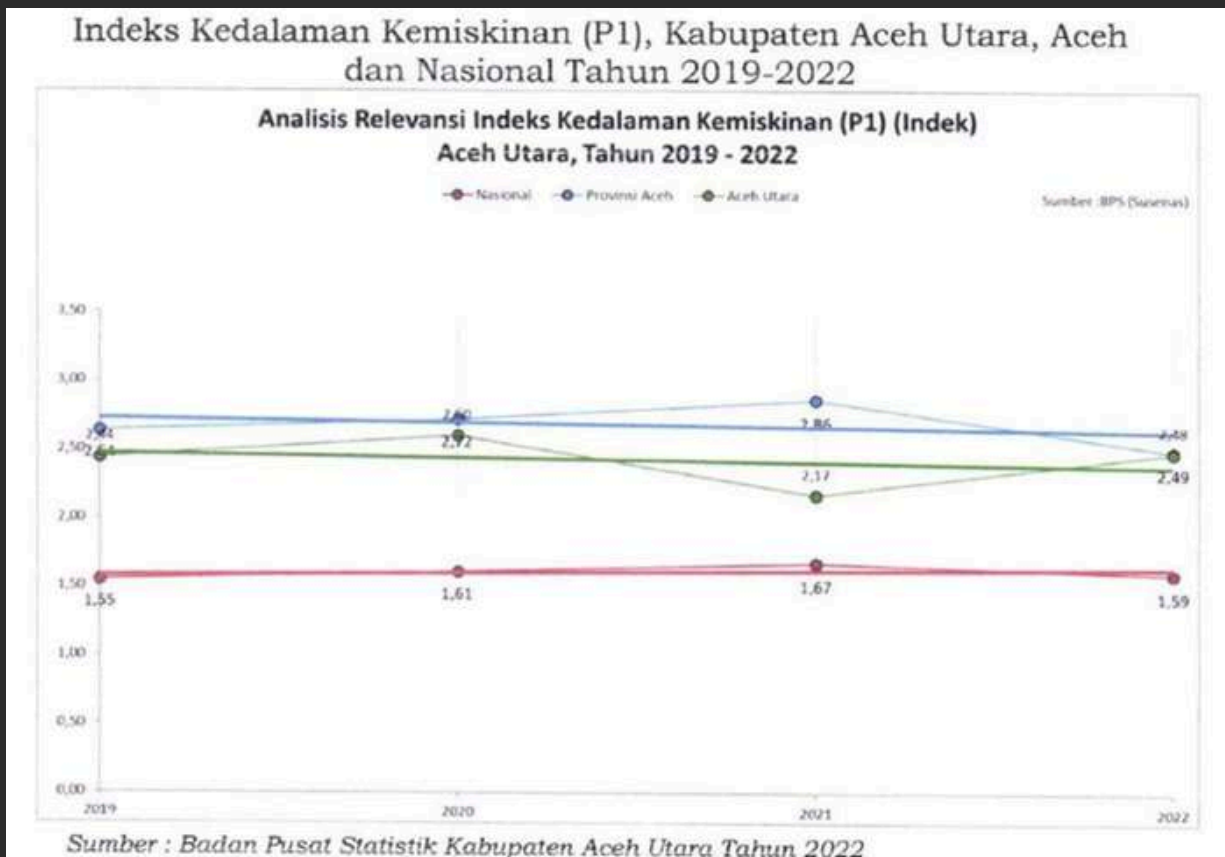
# LAMPIRAN



## GRAFIK JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN ACEH UTARA DAN ACEH TAHUN 2019-2022



## GRAFIK INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1), KABUPATEN ACEH UTARA, ACEH DAN NASIONAL TAHUN 2019-2022



# LAMPIRAN



## TABEL ANALISA PESTLE

Aspek	Permasalahan Utama	Implikasi Strategis
<b>Political (Politik)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Dana Desa sentralistik.</li> <li>• Ketidaksinkronan program pusat &amp; daerah.</li> <li>• Ketergantungan pada kebijakan pusat (earmark 20% untuk pangan).</li> </ul>	Pemda sulit berinovasi dan menyesuaikan program sesuai kebutuhan lokal.
<b>Economic (Ekonomi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan tinggi (16%).</li> <li>• Industri besar ada, tapi keterlibatan tenaga kerja lokal rendah.</li> <li>• Pertanian &amp; perikanan belum terhubung dengan rantai nilai industri.</li> <li>• CSR belum terintegrasi.</li> <li>• Dana Desa besar tapi belum</li> </ul>	Ketimpangan antara potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat → kemiskinan struktural.
<b>Social (Sosial)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pendidikan &amp; keterampilan SDM.</li> <li>• Desa tertinggal masih banyak.</li> <li>• Partisipasi masyarakat dalam produk unggulan desa terbatas.</li> <li>• Tingginya jumlah penduduk miskin → kerawanan sosial.</li> </ul>	Hambatan sosial memperlambat transformasi desa & pemberdayaan masyarakat.
<b>Technological (Teknologi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendah adopsi teknologi pertanian &amp; perikanan.</li> <li>• Basis data desa &amp; kemiskinan belum optimal.</li> <li>• Akses digitalisasi terbatas.</li> </ul>	Produktivitas rendah, daya saing desa sulit berkembang.
<b>Environmental (Lingkungan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian &amp; perikanan rentan perubahan iklim.</li> <li>• Industri berpotensi menimbulkan polusi &amp; limbah.</li> <li>• Ancaman bencana (banjir, abrasi).</li> </ul>	Lingkungan rentan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
<b>Legal (Hukum/Regulasi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Dana Desa membatasi kreativitas Pemda.</li> <li>• Kewenangan Pemda terbatas dalam intervensi produk unggulan.</li> <li>• Belum ada aturan tegas integrasi CSR dengan RPJMD.</li> </ul>	Hambatan regulasi membuat program daerah tidak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

# LAMPIRAN



## DATA KEMISKINAN BPS ACEH UTARA.

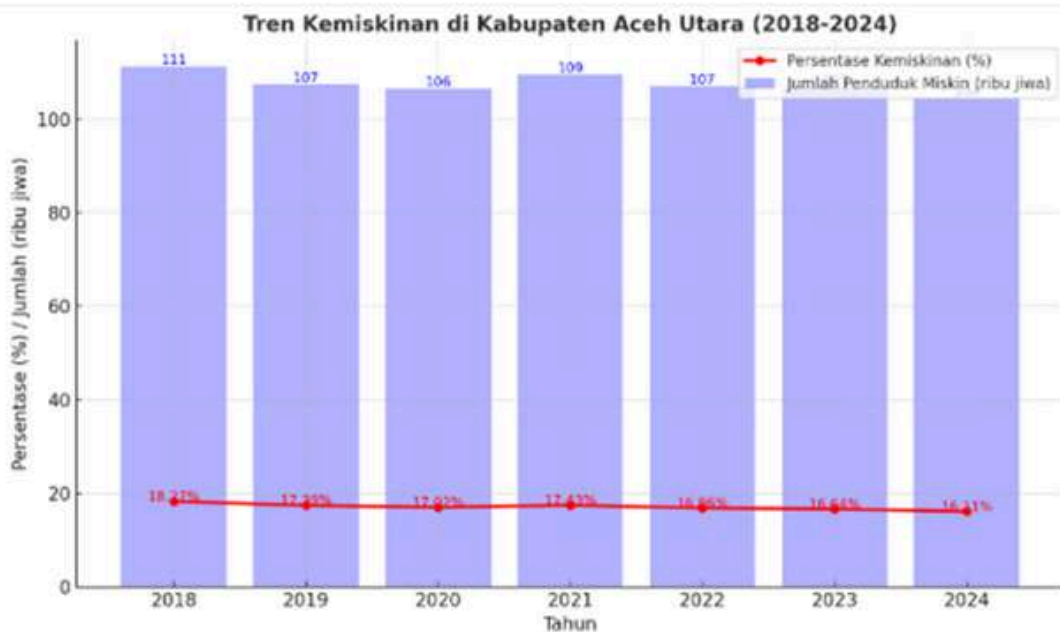
Indikator	Nilai Tahun 2023	Implikasi Strategis
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi Dana Desa sentralistik.</li> <li>Ketidaksinkronan program pusat &amp; daerah.</li> <li>Ketergantungan pada kebijakan pusat (earmark 20% untuk pangan).</li> </ul>	Pemda sulit berinovasi dan menyesuaikan program sesuai kebutuhan lokal.
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiskinan tinggi (16%).</li> <li>Industri besar ada, tapi keterlibatan tenaga kerja lokal rendah.</li> <li>Pertanian &amp; perikanan belum terhubung dengan rantai nilai industri.</li> <li>CSR belum terintegrasi.</li> <li>Dana Desa besar tapi belum optimal.</li> </ul>	Ketimpangan antara potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat → kemiskinan struktural.
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pendidikan &amp; keterampilan SDM.</li> <li>Desa tertinggal masih banyak.</li> <li>Partisipasi masyarakat dalam produk unggulan desa terbatas.</li> <li>Tingginya jumlah penduduk miskin → kerawanan sosial.</li> </ul>	Hambatan sosial memperlambat transformasi desa & pemberdayaan masyarakat.
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendah adopsi teknologi pertanian &amp; perikanan.</li> <li>Basis data desa &amp; kemiskinan belum optimal.</li> <li>Akses digitalisasi terbatas.</li> </ul>	Produktivitas rendah, daya saing desa sulit berkembang.
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian &amp; perikanan rentan perubahan iklim.</li> <li>Industri berpotensi menimbulkan polusi &amp; limbah.</li> <li>Ancaman bencana (banjir, abrasi).</li> </ul>	Lingkungan rentan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi Dana Desa membatasi kreativitas Pemda.</li> <li>Kewenangan Pemda terbatas dalam intervensi produk unggulan.</li> <li>Belum ada aturan tegas integrasi CSR dengan RPJMD.</li> </ul>	Hambatan regulasi membuat program daerah tidak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

# LAMPIRAN



## DATA KEMISKINAN BPS ACEH UTARA

Indikator	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
Persentase penduduk miskin	16,64 % ( <a href="http://Portalsatu.com">Portalsatu.com</a> )	16,11 % ( <a href="http://AJNN.net">AJNN.net</a> )
Jumlah penduduk miskin	106.770 jiwa ( <a href="http://Portalsatu.com">Portalsatu.com</a> )	104.490 jiwa ( <a href="http://Portalsatu.com">Portalsatu.com</a> )
Garis kemiskinan (per kapita / bulan)	-	Rp 473.719 ( <a href="http://BERITAMERDEKA.NET">BERITAMERDEKA.NET</a> )



Berikut infografis tren kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara (2018–2024) berdasarkan data BPS:

- Garis merah: persentase penduduk miskin (%)
- Batang biru: jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)

# LAMPIRAN

# DOKUMENTASI

